



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Evaluasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung
(RESPEK) Di Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara Jauh,
Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat**

Skripsi

Oleh

Marius Air

2012310021

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Evaluasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung
(RESPEK) Di Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara Jauh,
Kabupaten Maybrat, Papua Barat**

Skripsi

Oleh

Marius Air

2012310021

Pembimbing

Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Marius Air
Nomor Pokok : 2012310021
Judul : Evaluasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK)
di Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara Jauh, Provinsi Papua Barat.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 21 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP.,M.Si.

: 

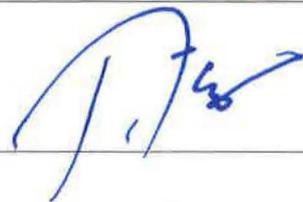
Sekretaris

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D

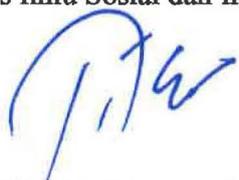
: 

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si,

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marius Air

NPM : 2012310021

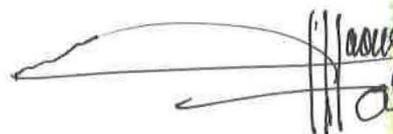
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK)
Di Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara Jauh, Kabupaten Maybrat,
Provinsi Papua Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Agustus 2017




Marius Air

ABASTRAK

Nama : Marius Air

NPM : 2012300021

Judul : Evaluasi Program Rencana Starategi Pembangunan Kampung (RESPEK) Kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

Program Rencana Strategi Pambangunan Kampung atau disingkat RESPEK adalah merupakan salah satu program pemerintah provinsi Papua Barat. Program tersebut dilaksanakan pada tiap-tiap kampung sejak tahun 2008, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan dana hibah sebesar 100 juta untuk setiap kampung di provisi Papua Barat. Program RESPEK merupakan program penjabaran dari UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus provinsi Papua dan Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian lima tujuan program RESPEK seperti yang tercantum dalam SK Gubernur Provinsi Papua Barat, yaitu untuk peningkatan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, *affirmative action* bagi putra dan putri Papua.

Penelitian ini adalah sebuah studi kasus dilaksanakan di kampung Yarat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat dengan .menggunakan pendekatan Community Driven Development (CDD) dari World Bank. Metoda penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen, wawancara mendalam dan observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan program RESPEK di kampung Yarat hanya dapat mencapai satu dari lima tujuan yang ditetapkan dalam SK Guernur, yaitu pembangunan infrastruktur murah untuk masyarakat, itu belum dapat memberdayakan masyarakat dikampung Yarat. Penelitian ini merekomendasikan, pertama, perlunya meningkatkan pengawasan program ditingkat kampung sebagai titik penilaian keberhasilan program. Kedua, perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Ketiga, perlunya kejelasan tujuan yang konkrit dari pemerintah agar hasilnya dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci: *Program RESPEK, Community Driven Development, Evaluasi Program, Papua Barat.*

ABSTRACT

Name : Marius Air

NPM : 2012310021

Title : Program Evaluation The Plan Strategic development Village (RESPEK) at Yarat Village, aifat Utara District, Maybrat Regency, West Papua Province

Strategic Plan For Village Development Program (RESPEK) is a program from west Papua province. This program was implemented at every village in wes papaua province, after before 2008 before created community justice with allocation fiscal Rp, 100 bilon for all of village in west Papua province. RESPEK program is implemented from UU Nomor 21 tahun 2001 is Asimetrical Autonomy for Papua and West Papua province. This is research aim to evaluate performance five objective RESPEK program as in content of SK Governor West Papua province: Promote Quality Infrastructure, second Promote economy community, third Promote community education, fourth, Promote Community Health, affirmative action for west Papua people.

This research is a study case in Yarat village, maybrat Regency, west Papua province used theory Community Driven Development approach from world bank. Research method is used in this is qualitative research method with three technique is document Study, Interview, and observation.

Output of this research shown RESPEK program implementation at Yarat village is simply the one of five objective RESPEK in Policy made governor West Papua province in, than that is Infrastructure development for community. That is not empowerment community in Yarat village. Recommendation from this research is: first, promote controlling program basic village as assessment successfully program. Second, promote participation community in this program, thirds, clear and objective from government because realized objective of program.

Key Word: *Program RESPEK, Community Driven Development, Evaluation Program, Papua Barat*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Kasih Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), di Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara Jauh, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat” dengan baik. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengkaji pencapaian kelima tujuan program RESPEK di kampung Yarat. Karya tulisan ilmiah ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan strata satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penulisan karya tulisan ilmiah ini, penulis menyadari, bahwa akan sulit tercapai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya, baik berbentuk materi maupun moril, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta mama Yuliana Taa, dan ayah Fransiskus Air sebagai ayah dan ibu kandung yang memberikan banyak keteladanan hidup dan dukungan doa serta cinta kasihnya untuk membesarkan penulis.
2. Empat kakak penulis, Susana Air, Florensia Air, Godeliva Air dan Selviana Air, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan di setiap saat.
3. Universitas Katolik Parahyanagan Bandung sebagai almamter yang memberikan nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada saya.
4. Yayasan *Stichting Parahyanagan Netherland* yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis selama empat tahun menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

5. Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengetahuan dalam proses penulisan karya tulis sehingga dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah ini.
6. Semua dosen dan karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik, yang telah memberikan bantuan yang bernilai dalam penyelesaian studi di Universitas Katolik Parahyanagan Bandung.
7. Bapak Fransiskus Bame selaku kepala kampung dan semua masyarakat kampung Yarat, yang telah menerima penulis dalam melakukan penelitian.
8. Pater Paul Tan, Pr. yang telah membantu agar penulis bisa dapat studi di Unuversitas Katolik Parahyangan.
9. Keluarga Maksimus Air yang telah mendukung penulis untuk tetap melanjutkan studi di Universitas Katolik Parahyangan.
10. Bapak Lukas Turot, Thomas Turot, Sakarias Turot selaku saudara sepupu dekat, yang selalu memberikan motivasi, membangkitkan semangat agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
11. Kami sampaikan terima kasih kepada SD YPPK ST. Petrus Konkayah tempat dimana penulis pertama kali bersekolah.
12. SMP Negri 1 Aifat sebagai tempat penulis mengenyam pendidikan di tingkat menengah
13. Keluarga Besar Seminari Petrus Vandiepen Aimaas Sorong, sebagai rumah belajar saya di waktu SMA.
14. Keluarga Besar PMKRI Cabang Bandung yang telah memberi dukungan moril yang besar kepada penulis.
15. Keluarga Mahasiswa Katolik Universitas Katolik Parahyanagan.

16. Gereja Mahasiswa Kesukupan Bandung yang telah memberikan banyak pengalaman dan keterampilan individual kepada penulis.

17. Teman-teman SPN khususnya SPN 5 dimanapun anda berada.

Semoga berkat Tuhan selalu turun atas semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini, dan semoga hasil karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membantunya.

Bandung 9 Juli 2017

Penulis,

Marius Air

NPM: 2012310021

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	11
1.3 Identifikasi Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah Khusus.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Evaluasi.....	14
2.2 Fungsi Evaluasi Program.....	16
2.3 Tipe Evaluasi Program.....	17
2.4 Aspek-aspek Evaluasi Program.....	18
2.5 Devinisi Program Community Deriven Development (CDD).....	18
2.6 Sejarah Perkembangan CDD.....	19
2.7 Wacana Mengenai Pendekatan CDD.....	20

2.8	Karakteristik Program CDD dalam Proyek Cycle.....	22
2.9	RESPEK Sebagai Program Berbasiss CDD.....	23
2.10	Tentang Program RESPEK.....	25
2.11	Pelaksanaan Program RESPEK.....	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
<u>3.2</u>	Subyek Penelitian.....	31
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4	Tahap-Tahap Penelitian.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6	Teknik Analisa Data.....	37
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38

BAB IV OBYEK PENELITIAN

4.1	Deskripsi Historis Yampung Yarat.....	40
4.2	Deskripsi Batas Geografis Kampung Yarat.....	41
4.3	Struktur Pemerintahan Kampung Yarat.....	41
4.4	Deskripsi Penduduk Kampung Yarat.....	42
4.5	Gambaran Umum Tetntang Fasilitas Kampung Yarat.....	42
4.6	Deskripsi Potensi Ekonomi Kampung Yarat.....	42

4.7	Potensi dan Peluang Pembangunan Kampung Yarat.....	43
4.8	Tantangan Pembangunan di Kampung Yarat.....	43
4.9	Kondisi Sosial Masyarakat Kampung Yarat.....	44
4.10	Program Bantuan masyarakat untuk kampung Yarat.....	45
4.11	Sejarah Program RESPEK di Kampung Yarat.....	45
4.12	Realisasi Program RESPEK Di Kampung Yarat.....	47
4.13	Definisi Program RESPEK.....	48
4.14	Spesifik Tentang Program RESPEK.....	49
4.15	Mekanisme Pelaksanaan Program RESPEK.....	50
4.16	Sumber Pedoman Program RESPEK.....	52
4.17	Pelaku dan Peran Pengelolaan Anggaran.....	53
4.18	Meknisme Penyampaian dan Pencairan Dana RESPEK.....	56
4.19	Mekanisme Penata Laksana Pertanggung Jawaban.....	57
4.20	Monitoring dan Evaluasi Program.....	57
4.21	Penutupan Program RESPEK.....	60
4.22	Program RESPEK Papua Barat.....	61

BAB V ANALISIS DATA DAN TEMUAN

5.1	Karakteristik Program CDD.....	64
5.2	Efektifitas Pelaksanaan Program RESPEK di kampung Yarat.....	67
5.2.1	Menciptakan Infrastruktur yang Baik.....	68
5.2.2	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.....	73

5.2.3	Peningkatan Kualitas Pendidikan.....	77
5.2.4	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.....	78
5.2.5	Afirmative Action Bagi Putar dan Putri Papua.....	78
5.3	Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Program RESPEK Kampung Yarat.....	79
5.3.1	Pembangunan yang berbasis di Kampung Yarat.....	79
5.3.2	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Yarat.....	81
5.4	Keseluruhan Hasil Evaluasi Program RESPEK.....	83
5.5	Deskripsi Tabel.....	84
5.5.1	Pendidikan.....	85
5.5.2	Sosial Ekonomi.....	86
5.5.3	Kesehatan.....	86
5.5.4	Affirmative Action bagi putra dan putri Papua.....	87

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1	Kesimpulan.....	89
6.2	Rekomendasi.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Deskripsi Penduduk Kampung Yarat.....	42
Tabel 2 Matriks proses evaluasi hasil dari lima tujuan program RESPEK du Kampung Yarat...84	

DAFTAR GAMBAR

- 1 Fasilitas MCK Kampung Yarat hasil pembangunan program RSPEK 2010 dan 2011
2. Infrastruktur Jalan beton dan Badan Jalan di Kampung Yarat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Gubernur Provinsi Papua Barat No 900/81/4/2015

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 3 : Daftar Gambar

DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Asian Development Bank
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
BAPEDA	: Badan Perencanaan Daerah
CDD	: Community Driven Development
OTSUS	: Otonomi Khusus
RESPEK	: Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung
PEMDA	: Pemerintah Daerah
SK Gubernur	: Surat Keputusan Gubernur
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tim PJOK	: Tim Penanggung Jawab Operasional Kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Opik mengenai kebijakan publik telah menjadi pokok pembahasan oleh para peneliti maupun para praktisi di belahan bumi ini. Pada penelitian ini akan dibahas tentang beberapa isu penting yang berkaitan dengan kebijakan publik pemerintah Republik Indonesia yaitu tentang Evaluasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Otonomi Khusus di provinsi Papua dan Provinsi Barat.

Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung atau disingkat dengan nama RESPEK adalah merupakan program yang digagas oleh pemerintah provinsi Papua, sebagai wujud implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di tanah Papua. Program ini murni lahir merupakan gagasan dari pemerintah provinsi Papua yang ingin mewujudkan Undang-Undang Otonomi Khusus sehingga dirasakan manfaat oleh lapisan masyarakat kecil di tanah Papua.

Bersamaan dengan kebijakan percepatan pembangunan pemerintah Republik Indonesia terhadap provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat merancang sebuah kebijakan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Maka lahirlah Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) Provinsi Papua dan Papua Barat. Program RESPEK adalah merupakan program yang direncanakan pemerintah provinsi Papua oleh mantan Gubernur Provinsi Papua Bernabas Suebu, S.H sebagai program penjabaran dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Program RESPEK ini dilaksanakan pada tahun 2007 dan didanai

oleh dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat Sebesar Rp. 100.000.000 per kampung dengan tujuan meningkatkan pembangunan di tingkat kampung.

Strategi pembangunan kampung ini merupakan bagian strategi yang digunakan dalam pendekatan membangun kampung dengan moto pembangunan dari kampung menuju kota, yaitu penerapan strategi desentralisasi fiskal dan kewenangan , penyusunan perencanaan program kerja secara partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam suatu perencanaan pembangunan khususnya di tingkat kampung. Dalam program RESPEK ini masyarakat dilibatkan secara penuh dan langsung menjadi subyek dan obyek dalam pembangunan di masyarakat. Mereka (masyarakat) yang merencanakan program, mereka yang melaksanakan program, mereka yang mengawasi program serta mereka yang nantinya menikmati hasil program. Program ini juga dapat membangun kemampuan dan kapabilitas aparatur kampung yang mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kampung secara optimal. Semua hal yang berkaitan dengan perencanaan di atas direncanakan di dalam program Rencana Strarategi Pembangunan Kampung (RESPEK). Program RESPEK ini rutin dilaksanakan tiap-tiap kampung di Tanah Papua baik provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat dan didukung oleh APBD Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam Surat Keputusan Gubernur provinsi Papua Barat terdapat lima tujuan yang dicapai oleh program RESPEK yaitu: 1) meningkatkan pendidikan, 2) meningkatkan kualitas kesehatan, 3) meningkatkan ekonomi kerakyatan, 4) meningkatkan infrastruktur, dan 5) affirmative action

bagi putra putri asli Papua¹. Kelima tujuan tersebut merupakan prioritas pembangunan dari program RESPEK provinsi Papua Barat.

Sebagai landasan hukum, kebijakan program RESPEK mengacu pada SK GUB PB NO. 900/81/4/2015 tentang penetapan lokasi dan alokasi dana Otonomi Khusus dan pedoman pengelolaan bantuan sumber dana Otonomi Khusus kepada pemerintah distrik, kelurahan dan kampung se provinsi Papua Barat². SK Gubernur tersebut dikeluarkan dalam konteks Keputusan Presiden Nomor 5 tentang unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang mengacu pada dasar hukum Undang-Undang NO 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di provinsi Papua dan Papua Barat.

Kebijakan Otonomi Khusus provinsi Papua dan Papua Barat, kini sudah berusia enam belas tahun. RESPEK merupakan program pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat sebagai program penjabaran dari kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Sebelum tahun 2006, Undang-Undang No 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus ini hanya mencakup Provinsi Papua dan merupakan program pemerintah Provinsi Papua. pada selang waktu antara 2001 sampai 2005. Pada tahun 2006 Provinsi Papua Barat atau dulu disebut provinsi dengan nama Irian Jaya Barat (IJB) dimekarkan sebagai daerah otonom baru dari Provinsi Papua oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu kedua daerah ini mendapatkan jaminan hak konstitusi yang sama dari Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus dan tidak satupun

¹ SK Gubernur Papua Barat nomor 900/81/4/2015, penempatan lokasi dan alokasi dana Otonomi Khusus dan pedoman pengelolaan bantuan keuangan sumber dana otonomi Khusus kepada pemerintah distrik, kelurahan dan kampung se-Provinsi Papua Barat.

² SK GUB PB NO 900/81/4/2015 tentang penetapan lokasi dan alokasi dana otonomi khusus dan pedoman pengelolaan bantuan sumber dana Otonomi Khusus kepada pemerintah distrik, kelurahan dan kampung se provinsi Papua Barat

dapat mengubah esensi Otonomi Khusus dari ke dua provinsi ini. Hanya memang dibagi urusan pemerintahan Pemerintah daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pada tanggal 21 November tahun 2001 ditetapkan sebagai hari jadi Undang-Undang Otonomi khusus di provinsi Papua dan Papua Barat, dan ditandai dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk provinsi Papua dan Papua Barat³.

Undang-Undang Otonomi Khusus adalah merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua⁴. Delegasi kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat Republik Indonesia kepada pemerintah daerah khususnya daerah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri (daerah) sesuai prakarsa dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat setempat dengan tujuan *percepatan pembangunan, peningkatan ekonomi, affirmative action bagi putra dan putri Papua, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Kewenangan ini merupakan kewenangan lebih luas untuk pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola potensi-potensi daerah termasuk kekayaan alam yang dimiliki di tanah Papua maupun potensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan dan perkembangan masyarakat Papua dan Papua Barat. Kewenangan ini diberikan kepada Orang Asli Papua (OAP) supaya memberi jaminan hukum yang memadai bagi masyarakat asli untuk memegang peranan aktif untuk ikut serta dalam proses perumusan kebijakan

³ www.prokum.esdm.go.id: UU No 21 tahun 2001 - Otonomi Khusus bagi provinsi papua (<http://prokum.esdm.go.id/uu/2001/uu-21-2001.pdf>) diakses pada 15 Februari 2017 pukul 15.09 WIB

⁴ Ibid, hal. 15

pembangunan, penentuan strategi pembangunan, serta memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat setempat.

Lahirnya provinsi Papua dan provinsi Papua Barat sebagai daerah yang memiliki otonomi dan kewenangan khusus adalah merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat Republik Indonesia supaya dapat membantu meningkatkan pelayanan publik serta percepatan pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan awal lahirnya Otonomi Khusus ini adalah supaya meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan perekonomian di provinsi Papua dan Papua Barat. Karena telah ada perbedaan perkembangan pembangunan di provinsi lain yang bukan merupakan provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Ketimpangan pembangunan inilah yang menjadi alasan untuk dibentuk Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Selain itu dengan adanya kebijakan Otonomi Khusus ini dapat membawa sebuah pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat Papua khususnya masyarakat asli Papua sebagai subyek atau pelaku pembangunan itu sendiri, dimana selama era orde baru masyarakat Papua dijadikan sebagai obyek pembangunan. Di sini berarti masyarakat Papua berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Ketimpangan ini yang menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka kemiskinan di provinsi Papua dan Papua Barat.

Kabupaten Maybrat adalah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat dengan ibu kota di Kumurkek. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, luas wilayah kabupaten Maybrat 5.461,62 KM², kabupaten Maybrat merupakan

kabupaten di Papua Barat yang tidak memiliki wilayah kelautan⁵. Wilayah kabupaten Maybrat seratus persen terdiri dari wilayah daratan. Jumlah penduduk kabupaten Maybrat tahun 2015 mencapai 33.529 jiwa berdiam di kabupaten Maybrat 20,35% penduduk miskin yang tersebar 25 distrik dan 159 kampung di kabupaten Maybrat⁶.

Pelaksanaan program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) pada tahun 2008 merupakan salah satu program pemberdayaan yang menempatkan masyarakat di kampung sebagai subyek dan obyek pembangunan. Meskipun telah diberikan kewenangan kepada kampung untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tetapi masalah kemiskinan menjadi sulit untuk dihentikan. Masalah kemiskinan di kabupaten ini menjadi terus meningkat di mana terlihat dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maybrat yang menunjukkan ada 20,35% masyarakat kabupaten Maybrat masih hidup di bawah garis kemiskinan, pendapatan perkapita Rp. 239.000,00 per bulan. Apabila dibandingkan dengan biaya atau tingginya harga di kabupaten Maybrat akibat dari transportasi yang sangat kurang, menyebabkan harga barang menjadi mahal dan pendapatan Rp 239.000 di atas tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Angka Rp. 239.000,00 di atas masih berada di bawah pendapatan nasional Rp. 397.662,00. Kabupaten Maybrat didiami 98% masyarakat asli suku Maybrat dan 2% masyarakat warga pendatang tinggal di daerah transmigrasi⁷.

Dalam rangka pembangunan kabupaten Maybrat seperti kabupaten lainnya di Indonesia kabupaten⁸ Maybrat terus meningkatkan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur,

⁵ BPS Kabupaten Maybrat.2016. *Maybrat dalam angka 2016* (https://maybratkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kabupaten-Maybrat-dalam-Angka-2016.pdf), hal.27 diakses pada hari jumat 2017 pukul 16.00

⁶ Ibid.

⁷ Loc. Cit, hal. 27

pembangunan manusia, baik pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 adalah berjumlah 28,25 juta orang miskin, dan Provinsi Papua mencapai angka 28,17% dan Papua Barat mencapai 25,82% , dari angka ini menunjukkan, bahwa provinsi Papua dan Papua Barat menempati posisi kemiskinan tertinggi di Indonesia (Sesuai data BPS 2015)⁹.

Sebagai wujud keseriusan dari pemerintah pusat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di provinsi Papua dan Papua Barat tebitlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Lahirnya Inpres ini menunjukkan komitmen dari Pemerintah Pusat untuk mempercepat dan meningkatkan proses pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, bahwa pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat harus dilakukan dengan pembangunan yang bersifat prioritas dan strategis. Adapun lima sektor prioritas dan strategis yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan, (2) Meningkatkan mutu pendidikan, (3) Meningkatkan mutu layanan kesehatan, (4) Mengembangkan sarana dan pra sarana dasar untuk meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah perbatasan negara, (5) Mengambil tindakan tepat yang dapat meningkatkan mutu sumber daya masyarakat adat Papua.

rogram RESPEK merupakan sebuah kebijakan publik karena kebijakan publik sendiri menurut definisi Riant Nugroho dalam buku *Public Policy*, kebijakan publik adalah sebagai “*setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah sebuah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan*”¹⁰.

⁹ Ibid, hal. 39

¹⁰ Nugroho Rant, *Public Policy*, Jakarta: Gramedia, 2011 hal, 96

Mengacu pada definisi tersebut, Program RESPEK tergolong dalam kebijakan publik, kerana Program ini tergolong dalam suatu kebijakan yang dibuat di level pemerintahan provinsi, khususnya provinsi Papua Barat, guna meningkatkan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di provinsi Papua dan Papua Barat. Program RESPEK ini merupakan keputusan resmi pemerintah provinsi Papua Barat.

Kabupaten Maybrat merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Maybrat dimekarkan pada tahun 2009. Karena daerah ini merupakan daerah pemekaran atau daerah otonom baru, maka tak luput dari permasalahan yang selalu datang. Masalah yang sering terjadi adalah terkait dengan ketidak stabilan politik yang terjadi di tubuh pemerintahan yaitu masalah kepentingan politik untuk merebut kursi kekuasaan, sengketa ibu kota kabupaten yang tak kunjung henti. Dari masalah-masalah itu maka akan menjadi penghambat pembangunan di kabupaten Maybrat pada umumnya. Pembangunan pun menjadi terkendala dan tidak lagi dilaksanakan sesuai dengan fungsi administrasi di mana memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.¹¹

Distrik Aifat Utara Jauh adalah salah satu distrik dari Kabupaten Maybrat. Distrik Aifat Utara Jauh merupakan distrik pemekaran dari distrik induk yaitu distrik Aifat. Distrik Aifat Utara Jauh ini dimekarkan pada tahun 2009 bersamaan dengan terbentuknya kabupaten Maybrat, distrik Aifat Utara dengan ibukota distrik di kampung Konkayah ini memiliki wilayah daratan dan lereng/puncak. Dari total 10 kampung yang ada di Distrik Aifat Utara ini, 9 kampung berada di wilayah dataran, sedangkan 1 kampung berada di Lereng/puncak. Luas wilayah Aifat Utara Jauh

¹¹ BPS Sorong selatan(2015). *Statistik Daerah Distrik Aifat Utara*. Teminabuan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan.

yang berada di Kabupaten Maybrat ini memiliki luas wilayah 519,38 km² atau sekitar 9,51 persen (berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi agenda dunia, agenda pemberantasan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan di seluruh dunia oleh PBB yang mana termuat dalam Milenium Development Goals (MDGs) dan dilanjutkan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 tujuan. Ada delapan target pembangunan MDGs pada tahun 2015 dan salah satu dari target itu adalah pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia. Dan juga salah satu tujuan dari SDGs adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Walaupun program MDGs telah selesai tetapi masalah kemiskinan khususnya di kabupaten Maybrat belum teratasi.

Berbagai negara di dunia telah menggunakan berbagai cara dan strategi untuk mengatasi laju kemiskinan di negaranya masing-masing. Berbagai pendekatan pembangunan mulai dari top down, bottom up dan cara-cara khusus yang dipergunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di Indonesia telah menggunakan berbagai pendekatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan harapan bahwa masalah kemiskinan bisa dapat diatasi laju pertumbuhannya. Dan kesenjangan pembangunan antara daerah dan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Kemiskinan merupakan salah satu agenda penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintahan yang melaksanakan pembangunan khususnya pemerintah daerah di Indonesia. Masalah kemiskinan bukan merupakan masalah ekonomi semata tetapi merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan kompleks. Masalah kemiskinan merupakan masalah bersama oleh karena itu dalam tujuan negara sebagai mana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 di mana tersurat kalimat negara wajib

melindungi dan mensejahterakan masyarakat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, kesejahteraan seluruh masyarakat diatur dan sekaligus dilindungi oleh Undang-Undang yang menjadi konstitusi dasar negara Republik Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat mendesak dan harus diatasi. Masalah kemiskinan memerlukan pendekatan pembangunan sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar hidup manusia. Karena masalah kemiskinan berhubungan dengan hak dasar hidup manusia yaitu hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kesejahteraan baik terutama untuk masyarakat yang tertindas.

Kemiskinan menjadi salah satu tema yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Semangat Otonomi Khusus memberi nuansa baru bagi pemerintah daerah di provinsi Papua dan Papua Barat untuk dapat melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dan mengangkat budaya setempat, dengan melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan, dan menjadikan masyarakat yang terlibat sebagai subyek dan obyek pembangunan yang sedang diselenggarakan. Pemberdayaan masyarakat Papua khususnya di kabupaten Maybrat menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Program RESPEK yang telah dijalankan selama 2008 hingga 2017 sekarang ini, dalam hasil temuan, belum mencapai semua tujuan pemerintah provinsi Papua Barat yang mana belum mengatasi masalah kemiskinan di Papua dan Papua barat. Namun dari segi tujuannya program ini merupakan program yang di rencanakan sebagai program pemberdayaan masyarakat, dan dengan tujuan melibatkan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam pembangunan di daerah Papua dan Papua Barat, serta pembangunan yang berpusat di kampung.

elain tentang Otonomi Khusus dan program RESPEK kita juga membahas pemahaman tentang evaluasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah *What Ever Government choose to or not to do*, apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan William N. Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai¹³ Dalam buku Public Policy, Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan publik adalah “setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah sebuah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”¹⁴

1.2 Fokus Penelitian

erdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut: *“Apakah pelaksanaan program RESPEK di kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip yang sudah ditentukan?”*

1.3 Identifikasi Masalah

Menurut SK Gubernur provinsi Papua Barat tujuan RESPEK ada 5 tujuan seperti yang disebutkan dalam latar belakang di atas yakni: 1) Peningkatan ekonomi kerakyatan, 2) Peningkatan kualitas pendidikan, 3) Peningkatan kualitas kesehatan, 4) Peningkatan Infrastruktur kampung, 5) Affirmative action bagi putra dan putri Papua. Selain itu, untuk mencapai lima tujuan program RESPEK tersebut, program RESPEK menggunakan dua prinsip yang juga terdapat dalam SK Gubernur yaitu: 1) Pembangunan dari kampung menuju kota atau pembangunan yang berpusat di kampung, 2) pemberdayaan masyarakat di kampung.

¹³ Nugroho Riant, Public Policy, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 93.

¹⁴ Ibid, hal. 96

1.4 Rumusan Masalah Khusus

Berdasarkan pertanyaan umum dan identifikasi masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah spesifik dari penelitian ini yang ingin dijawab peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada peningkatan infrastruktur di kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat dari program RESPEK?
2. Apakah ada peningkatan ekonomi di Kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat?
3. Apakah ada peningkatan pendidikan di Kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat?
4. Apakah ada terjadi peningkatan kesehatan di Kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat?
5. Apakah ada peningkatan *affirmative action* bagi putra-putri Papua di kampung Yarat , distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat?
6. Apakah pelaksanaan program RESPEK berpusat di kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat?

Apakah dengan kehadiran program RESPEK telah terbangun pemberdayaan masyarakat di kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, yaitu:

1. Untuk menggambarkan apakah program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) yang dilaksanakan di kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat sudah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi Papua Barat.
 2. Untuk menjelaskan apakah program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) benar dilaksanakan dan berpusat di kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, Kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat
- Untuk menjelaskan apakah Rencana Strategi Pembangunan Kampung dapat memberdayakan masyarakat di kampung Yarat, distrik Aifat Utara Jauh, kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat berguna dalam mengkaji kinerja program-program pemerintah pada masa yang akan datang.
2. Secara metodologi, penelitian ini memperkaya indikator pengukuran kinerja program pemerintah khususnya dilihat dari efektifitas program.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi program pemerintah, khususnya program RESPEK di kampung Yarat dalam mencapai tujuan program RESPEK itu sendiri.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Evaluasi Program